

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - Tugas dan Syarat - Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta

Disusun Oleh :

Devia Duwi Hastuti

19220045

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - Tugas dan Syarat - Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Surakarta

Disusun Oleh :

Devia Duwi Hastuti

19220045

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Devia Duwi Hastuti
NIM : 19220045
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018-2022.

Disetujui dan disahkan

Hari :

Tanggal :

PEMBIMBING

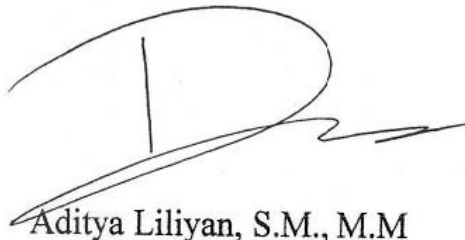


Eko Triyanto, S.E., M.M

NIDN : 0217048601

Mengetahui,

Wakil Ketua 1



Aditya Liliyan, S.M., M.M

NIDN : 0606118902

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Devia Duwi Hastuti
NIM : 19220045
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota
Surakarta Tahun Anggaran 2018-2022.

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Hari :
Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Eko Triyanto, S.E., M.M

Anggota : Dewi Ika Octavia, S.E., M.Si

Tanda Tangan

.....
.....

Mengetahui,



Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H.

NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Surakarta, 25 Agustus 2023

Yang Memberi Pernyataan



Devia Duwi Hastuti

MOTTO

“Kebahagiaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit Kembali setiap kali kita jatuh” (Confusius)

“Tidak perlu merasa terbebani dengan apa yang Allah berikan, karena Allah tidak pernah melimpahkan sesuatu melebihi dari apa yang jadi kemampuan kita”.

“Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran, coba dulu nanti akan terbiasa”

“Tak selamanya langit itu kelam suatu saat kan cerah juga, hiduplah dengan sejuta harapan, Habis gelap terbit terang”.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua saya yang senantiasa dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, serta mendoakan yang tiada putus – putusnya. Dan kakak saya yang selalu peduli dan memberikan dukungan semangat.
2. Teman-teman saya yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Almamater saya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018-2022”.

Penyusunan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas - tugas dan syarat - syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari dalam Menyusun Skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini S.E., M.Acc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
3. Bapak Eko Triyanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing serta memberikan arahan dan masukan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.
5. Seluruh staff dan karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
6. Kedua orangtua saya yang senantiasa dengan tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, serta mendoakan yang tiada putus – putusnya. Dan kakak saya yang selalu peduli dan memberikan dukungan semangat.
7. Teman-teman saya yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis berharap pihak – pihak diatas mendapatkan balasan yang berlipat – lipat dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, informasi tambahan, dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukoharjo, 28 Agustus 2023

Penulis

Devia Duwi Hastuti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PENGESAHAM SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Praktis.....	7
2. Manfaat Teoritis	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Kinerja Keuangan	8
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
3. APBD	10
4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	15
6. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
B. Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pikir	26
BAB III.....	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Objek Penelitian.....	28

B. Jenis dan Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Definisi Operasional.....	30
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35
ANALISIS DAN PERSEMBAHAN	35
A. Deskripsi Objek Penelitian	35
B. Identitas Responden (Deskripsi Responden)	39
C. Analisis Data	45
D. Pembahasan	53
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Table 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018-2022	2
Table 2 Target Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Surakarta tahun 2018-2022	3
Table 3 Kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah.....	30
Table 4 Kriteria Efektifitas PAD	31
Table 5 Kategori Nilai Efisien	33
Table 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surakarta	39
Table 7 Perhitungan Rasio Kemandirian	46
Table 8 Perhitungan Rasio Efektifitas PAD	47
Table 9 Perhitungan Rasio Pertumbuhan.....	49
Table 10 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi	50
Table 11 Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal	51
Table 12 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir	26
Gambar 2 Batas Wilayah Pemerintah Daerah Kota Surakarta	38
Gambar 3 Bagan Struktur Pemerintahan Kota Surakarta	45
Gambar 4 Grafik Rasio Kemandirian	46
Gambar 5 Grafik Rasio Efektivitas PAD	48
Gambar 6 Grafik Rasio Keserasian Belanja Operasi	50
Gambar 7 Grafik Rasio Keserasian Belanja Modal	51
Gambar 8 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018	67
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019	70
Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	71
Lampiran 4 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	73

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2018-2022 jika dilihat dari : (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (2) Rasio Efektivitas PAD (3) Rasio Pertumbuhan (4) Rasio Keserasian (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan studi pustaka untuk metode pengumpulan data. Hasil dari analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta jika dilihat dari (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, maka memiliki pola hubungan yang Konsultif karena besarnya rata-rata rasio ini sebesar 41,85%. (2) Rasio Efektivitas PAD, tergolong kriteria Efektif dengan angka rata-rata 101,53%. (3) Rasio Pertumbuhan, diketahui bahwa rata-rata dari Pertumbuhan PAD 2,04%, Pertumbuhan Pendapatan 2,04%, Pertumbuhan Belanja Operasi 5,55%, dan pertumbuhan belanja modal -0,62%. Pertumbuhan belanja modal mengalami trend pertumbuhan negative disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemi *covid-19* yang mengharuskan pemerintah daerah untuk merubah APBD. (4) Rasio Keserasian, maka diketahui bahwa rata-rata dari belanja operasi daerah terbilang masih sangat tinggi yaitu 77,71% jika dibandingkan dengan rata-rata belanja modal yang sebesar 21,43% sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah masih kurang dalam memperhatikan pembangunan daerah. (5) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, maka tergolong kriteria yang Kurang Efisien karena angka rata-rata persentasenya 98,90%.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Daerah, Rasio Keuangan Daerah*

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022

ABSTRAC

This research aims to analyze the Regional Financial Performance of the Surakarta City Government for the 2018-2022 budget year when viewed from: (1) Regional Financial Independence Ratio (2) PAD Effectiveness Ratio (3) Growth Ratio (4) Harmony Ratio (5) Regional Financial Efficiency Ratio . This research uses a qualitative descriptive research method with a quantitative descriptive approach carried out in the Surakarta City Regional Government. This research uses documentation and literature study for data collection methods. The results of this research analysis show that the Regional Financial Performance of the Surakarta City Government, when viewed from (1) the Regional Financial Independence Ratio, has a consultative relationship pattern because the average size of this ratio is 41.85%. (2) PAD Effectiveness Ratio, classified as Effective criteria with an average figure of 101.53%. (3) Growth Ratio, it is known that the average PAD growth is 2.04%, income growth is 2.04%, operating expenditure growth is 5.55%, and capital expenditure growth is -0.62%. Capital expenditure growth experienced a negative growth trend due to the Covid-19 pandemic in 2020 which required regional governments to change the APBD. (4) Harmony Ratio, it is known that the average regional operating expenditure is still very high, namely 77.71% when compared to the average capital expenditure of 21.43%, so it can be said that regional governments are still not paying enough attention to regional development. . (5) Regional Financial Efficiency Ratio, therefore it is classified as a Less Efficient criterion because the average percentage figure is 98.90%.

Keywords: Regional Government Financial Performance, Regional Financial Ratios

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum menjelaskan mengenai mekanisme atas diberikannya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI, termasuk urusan pada bidang administrasi, politik dan ekonomi serta pengelolaan keuangan daerah. Pemberian otonomi daerah ditujukan untuk memicu kemandirian daerah dalam mengembangkan dan menggali sumber daya yang dimilikinya serta dapat memicu pertumbuhan daerah agar ketertinggalan dalam berbagai bidang dapat teratasi. Dari kewenangan otonomi tersebut juga memiliki konsekuensi yaitu, kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan yang dapat terpenuhi jika pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerahnya, yaitu potensi SDA, SDM dan potensi sumber daya keuangan secara optimal.

Pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pada asas desentralisasi yang menjadi landasan atau acuan pemerintah pusat dalam menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah. Di dalam struktur APBD terdapat komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan yang merupakan ringkasan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi selama 1 (satu) periode tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap nasib suatu daerah, jika ingin aset daerah terjaga keutuhannya maka membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Masyarakat dapat melihat dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat ditentukan oleh kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan pemerintah

seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang di dalamnya terdapat penjabaran kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk dalam representasi kepatuhan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Pada Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Kota Surakarta tahun 2018 - 2022, dapat diketahui besarnya realisasi pendapatan asli daerah yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018-2022

Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah/ PAD (RP)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah/ PAD (RP)	Presentase Realisasi (%)
2018	1.867.608.629.741,00	1.879.056.016.679,09	100,61
2019	2.002.535.206.674,00	1.945.953.241.924,00	97,17
2020	1.789.457.852.505,00	1.831.319.373.387,00	102,34
2021	1.945.769.363.239,46	1.939.268.856.769,00	99,67
2022	2.152.659.533.038,00	2.028.438.691.045,88	94,23

Sumber : LRA Pemkot Surakarta

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi yang dimulai pada tahun 2018 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta sebesar Rp1.879.056.016.679,09 atau sebesar 100,61 % dari target yang sudah ditentukan. Dan pada tahun 2019 presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mengalami penurunan dari 100,61% menjadi 97,17%. Pada tahun 2020 presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mengalami kenaikan dari 97,17% menjadi 102,34% atau sesuai dengan target.

Pada tahun 2021 presentase realisasi PAD Kota Surakarta mengalami penurunan dari 102,34% menjadi 99,67% dan tahun 2022 mengalami penurunan dari 99,67% menjadi 94,23%. Menurunnya presentase Pendapatan Asli Daerah ini terjadi karena realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Namun pada tahun 2020 presentase realisasi mengalami kenaikan dari 97,17% menjadi 100,00% atau sesuai dengan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2020. Sehingga dengan demikian jika dilihat dari presentase realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta yang mengalami fluktuasi menunjukkan bahwa keuangan daerah Kota Surakarta terutama untuk penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah belum optimal.

Selain dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Realisasi belanja daerah Kota Surakarta juga perlu dilihat sebagai pengurangan kas daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam satu periode akuntansi. Adapun belanja daerah Kota Surakarta Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2 Target Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Surakarta tahun 2018-2022

Tahun	Target Belanja (RP)	Realisasi Belanja (RP)	Presentase Realisasi (%)
2018	2.090.933.683.155,17	1.913.787.493.276,00	91,53
2019	2.173.401.766.803,17	2.011.613.989.386,00	92,56
2020	1.885.698.744.826,00	1.638.665.726.421,00	86,90
2021	845.660.155.682,00	720.683.583.846,00	85,22
2022	2.459.474.822.361,00	2.087.823.395.600,00	84,89

Sumber : LRA Pemkot Surakarta

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target dan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp2.090.933.683.155,17 atau sebesar 91,53% dari target yang sudah ditentukan. Pada tahun 2019 presentase realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dari 91,53% menjadi 92,56%. Pada tahun 2020 dan 2021 presentase realisasi belanja daerah mengalami penurunan, tahun 2020 dari 92,56%

menjadi 86,90% dan pada tahun 2021 dari 86,90% menjadi 85,22%. Pada tahun 2022 persentase realisasi belanja daerah menjadi semakin menurun dari 85,22% menjadi 84,89%. Kesimpulan dari tabel di atas, realisasi belanja Pemerintah Kota Surakarta mengalami fluktuasi kenaikan pada tahun 2019 dari 91,53% menjadi 92,56% dan mengalami penurunan dari tahun 2020-2022 dengan persentase penurunan 92,56% menjadi 84,89%. Sehingga dengan demikian, jika dilihat dari persentase realisasi belanja daerah Kota Surakarta pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan dan pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam membiayai belanja daerah, Pemerintah Kota Surakarta belum optimal dikarenakan adanya pandemic *covid-19* yang memerlukan pembiayaan dalam penanganannya.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja keuangan. Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli daerah dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerahnya agar tidak memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh dalam menggunakan atau memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat daerah untuk batasan - batasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Lestari *et al.*, 2020). Selain itu juga di dalam suatu penelitian mengatakan, Pengukur kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang telah dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.

Ukuran untuk mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan adalah indikator kinerja yang berpedoman pada elemen indikator kinerja. Terdapat lima elemen indikator kinerja yaitu: 1) Indikator masukan (input) segala hal baik yang berupa dana, sumber daya manusia, maupun informasi yang diperlukan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kegiatan demi mendapatkan hasil yang diharapkan. 2) Indikator keluaran

(output) sesuatu yang didapatkan dari kegiatan yang telah dilakukan baik berupa barang maupun jasa. 3) Indikator hasil (outcome) hasil kegiatan yang dapat diterima atau dirasakan secara langsung oleh pihak lain atau masyarakat dalam jangka waktu menengah. 4) Indikator manfaat (benefit) adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat atau pihak lain atas hasil kerja pemerintah atau organisasi tertentu. 5) Indikator dampak (impact) pengaruh yang timbul dari kegiatan yang telah dilakukan. Indikator dampak, misalnya: peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengukuran pendapatan masyarakat (Lestari *et al.*, 2020).

Kinerja keuangan suatu daerah dapat diketahui melalui analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap suatu laporan keuangan daerah dengan tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengendalikan keuangan daerahnya. Analisis rasio keuangan pada suatu Laporan Realisasi Anggaran yang telah dilaksanakan serta ditetapkan merupakan salah satu dari berbagai cara menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengendalikan keuangan daerahnya. Rasio merupakan suatu ukuran tertentu yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan (Lestari *et al.*, 2020). Analisis rasio dalam laporan keuangan digunakan untuk menganalisis suatu laporan keuangan secara luas dan telah diterapkan pada lembaga organisasi yang bersifat komersial. Manfaat dari analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah adalah agar dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta dan sebagai acuan agar lebih meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah pada periode selanjutnya. Hasil dari analisis rasio laporan keuangan menjadi tolak ukur dalam mengukur kemandirian pemerintah daerah Kota Surakarta dalam membiayai kebutuhan belanja daerahnya tanpa bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi), efektivitas kemampuan pemerintah daerah Kota Surakarta guna mencapai PAD yang telah dialokasikan, pertumbuhan pemerintah daerah Kota Surakarta dalam mempertahankan pendapatan dan pengeluaran daerah untuk meningkatkan keberhasilan atas pendapatan dan pengeluaran yang telah dicapai, keserasian pemerintah daerah dalam mendistribusikan dana dengan benar untuk

pengeluaran operasional/rutin dan belanja modal, dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

Sehingga dalam hal ini perlunya analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta agar dapat mengetahui realisasi anggaran yang telah tercapai dibanding dengan rancangan anggaran yang sudah dibuat, apakah sudah optimal atau belum dalam realisasinya. Hal ini dilakukan tentunya akan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun pihak yang terkait dalam melihat kinerja keuangan daerah Kota Surakarta sebagai dasar pengambilan keputusan. Berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di kota Surakarta dengan judul penelitian “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018-2022”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan ?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Keserasian ?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, Rasio Keuangan Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam menganalisis kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan menerapkan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, serta Rasio Efisiensi Keuangan Daerah yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menganalisis kinerja keuangan dan dan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritik tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta ditinjau dari teori Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan, Rasio Keserasian, serta Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Surakarta.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu organisasi pada periode tertentu baik pendapatan atau pengeluaran menggunakan suatu ukuran tertentu dalam melihat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan serta kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis keuangan sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi - potensi kinerja yang akan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu menjadi organisasi yang menyelenggarakan pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab keuangan atas dana yang dihimpunnya pada saat penilaian kinerja keuangannya. Analisis keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis jumlah APBD pada pemerintah daerah tersebut. Pihak yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yaitu Pihak eksekutif yang memberikan rancangan penyusunan APBD, Sedangkan Pemerintah pusat/provinsi hanya memberikan bahan masukan untuk mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah, dan pemerintah kota/kabupaten dan para kreditur (Yulinchton *et al.*, 2022).

Suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah akibat kinerjanya dalam menyelenggarakan keuangan daerah yaitu berupa Laporan Keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memberikan informasi tentang penyelenggaraan keuangan daerah yang dapat difungsikan untuk pengambilan keputusan merupakan tujuan dari adanya

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mariasari & Nasehati S, (2021), Sebuah kinerja ialah pencapaian sesuatu yang sebelumnya dimaksudkan. Kinerja yang baik didefinisikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Sedangkan kinerja keuangan ialah ukuran kinerja yang dilakukan dengan memanfaatkan suatu indikator, khususnya indikator keuangan. Tujuan dari analisis kinerja keuangan ialah guna menguji kinerja organisasi sebelumnya dengan memanfaatkan berbagai analisis keuangan. Analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu metode yang dapat difungsikan guna mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah juga merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat diukur dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain atau bisa disebut dalam bentuk moneter ataupun komoditas. Menurut Fornia *et al.*, (2021) mengenai keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 atau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Republik Indonesia, 2019). Bidang keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan biaya daerah serta memberikan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk berbisnis dengan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Pendapatan daerah;
- d. Belanja daerah;

- e. Kekayaan daerah yang dikuasai pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang dapat diukur dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan dari perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan / atau kepentingan umum.

Menurut Sari *et al.*, (2021) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan. Jadi, Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

3. APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Suatu rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (WANCE, 2019). APBD menurut UU No. 23 Tahun 2014 merupakan suatu bentuk anggaran kegiatan pemerintah daerah yang mencakup rencana pengeluaran biaya dan rencana pendapatan yang diperoleh selama satu periode. Menurut Dri & A. Pangastuti P., (2022) mengatakan bahwa anggaran memiliki fungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kebijakan fiskal. Oleh karena itu, anggaran selalu memegang prioritas penting dalam pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah daerah dipaparkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut PSAP No. 1 tahun 2019 berisi tentang sumber dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi

kinerja pemerintah dalam penggunaan anggaran keuangan daerah. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya dalam pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan (Darma, 2019). Menurut Darma (2019) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan pendapatan yang dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Dri & A Pangastuti P, (2022) APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh pemimpin daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dalam bentuk kebijakan milik pemerintah daerah. APBD merupakan suatu bentuk rencana keuangan yang nantinya akan digunakan untuk mengelola sumber daya daerah. Hasil dari pengelolaan keuangan tersebut harus mencerminkan pemerintahan yang bersih karena dituntut untuk tertib, transparan, dan akuntabel yang disusun dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus disusun menggunakan standart akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010 dengan menggunakan basis akrual. Laporan keuangan dikatakan akurat apabila didukung dengan hasil opini audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan daerah adalah betuk pertanggungjawaban keuangan daerah mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu gambaran hasil pencapaian kinerja pemerintah daerah yang menggunakan dana dalam yang dipergunakan untuk belanja atau pembiayaan serta dana pendapatan yang diterima dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, sumbangan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Panggabean, 2019). Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan informasi

dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Banyaknya pihak yang memerlukan informasi atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah mengharuskan membuat laporan keuangan yang baik dari segi penyajian data secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dari segi material yang disajikan secara wajar. Keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah didukung dengan hasil opini audit yang diberikan oleh auditor pemerintah daerah yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Panggabean, 2019). Hasil opini pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh auditor pemerintah merupakan salah satu cara untuk mengetahui berjalannya pemerintahan yang baik.

Dalam sebuah informasi keuangan pasti akan memuat data dari berbagai bentuk pembiayaan, belanja, dan investasi dari aktivitas pemerintah yang disajikan ke dalam laporan keuangan daerah. Pondasi untuk melaksanakan pemerintah yang bebas dari penyimpangan sehingga kepala daerah lebih Amanah dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan demi kesejahteraan public yaitu akuntabilitas dan transparansi. Menurut Panggabean (2019) Pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang dipungut oleh pemerintah daerah maka pemerintah daerah wajib membuat suatu laporan baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk laporan tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Dua alasan utama mengapa pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan, yaitu : laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyajikan suatu informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholders* dalam menilai akuntabilitas dan transparansi yang dipergunakan untuk Menyusun suatu kebijakan, ekonomi, sosial dan politik dengan menyediakan informasi terkait posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kepatuhan realisasi terhadap rencana anggaran yang telah disusun terhadap peraturan yang telah diatur, cara entitas dalam pelaporan yang mendanai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan dana likuid, potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk mengevaluasi kebijakan atas kemampuan pemerintah daerah dan SKPD dalam mendanai aktivitasnya (Panggabean, 2019).

Pajak yang dibayar oleh masyarakat serta dana hibah yang diberikan oleh lembaga/yayasan dan diterima oleh pemerintah, membuat masyarakat ingin mengetahui mengenai pengelolaan dana tersebut. Masyarakat ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan telah tertata sesuai peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah terpenuhi dengan baik. Kreditor dan investor juga membutuhkan data informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat resiko berinvestasi, kondisi finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah. DPRD dan organisasi politik yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga membutuhkan informasi keuangan untuk mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi laporan keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian

manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi , pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima jika dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Panggabean, 2019).

Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut ; Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Andal, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis. Serta dapat dipahami, artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Panggabean, 2019).

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan APBD antara lain (Susanto, 2019) :

- a. DPRD sebagai wakil rakyat masyarakat.
- b. Pihak eksekutif, sebagai landasan penyusunan APBD pada Tahun Anggaran berikutnya.
- c. Pemerintah Pusat/Provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- d. Masyarakat dan Kreditor sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman atau membeli obligasi.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendeskripsikan laporan keuangan pokok pemerintah terdiri dari (Susanto, 2019) :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- f. Laporan Arus Kas (LAK)
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Dona & Lestari (2020) Anggaran merupakan suatu pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam suatu ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas. Proses penyusunan anggaran bertujuan untuk:

- a. Membantu pemerintah dalam mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antarbagian dalam lingkungan pemerintah.
- b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
- c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Faktor dominan dalam proses penganggaran:

- a. Tujuan dan target yang hendak dicapai.
- b. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target.
- d. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya.

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai setiap kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastiaan atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber yang digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dona & Lestari, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah memuat gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah yang menggambarkan perbandingan anggaran dan pelaksanaannya selama satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang secara langsung dapat tercakup dalam laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pendanaan. Masing-masing elemen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Fornia *et al.*, 2021):

- a. Pendapatan (basis kas) merupakan pendapatan bendahara negara / daerah atau badan pemerintah lainnya yang menambah modal saat ini dari dana tersebut selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang merupakan hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan oleh negara.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah undang-undang pemerintah yang diakui sebagai surplus kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) merupakan suatu bentuk pengeluaran bendahara negara / daerah yang mengurangi modal ekuitas dana berjalan selama tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diganti oleh negara.

- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang aktiva bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan atau pembayaran uang oleh entitas pelapor dari / kepada entitas pelapor lain, termasuk dana neraca dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap pendapatan / pengeluaran yang perlu dikembalikan dan / atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang dalam penyusunan APBN terutama ditujukan untuk menutup defisit atau surplus penggunaan anggaran
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil penjualan aset. Biaya keuangan digunakan, antara lain, untuk pembayaran kembali jumlah pokok pinjaman kepada organisasi lain dan untuk penyertaan modal negara.

Dengan demikian berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa laporan Realisasi Anggaran adalah komponen laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan sumber pendapatan, belanja/ pengeluaran, transfer pemerintah daerah dan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode pelaporan yang dapat bermanfaat dalam memprediksi sumber daya ekonomi.

6. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Dri & A Pangastuti P, (2022) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berfungsi memberikan informasi tentang keuangan kepada pihak berkepentingan yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi keuangan juga dapat digunakan apabila bersifat relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Sifat LKPD adalah general purposive yang artinya umum dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan penggunaanya. Faktanya para pemangku kepentingan tidak semuanya dapat memahami laporan tersebut karena

mereka memiliki latar belakang yang bervariasi. Oleh karena itu, untuk membantu para pemangku kepentingan dalam menggunakan informasi LKPD diperlukan bantuan akuntan analis. Menurut Susanto (2019) Penggunaan analisis rasio yang difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Susanto, 2019).

Analisis LKPD bertujuan untuk mengambil keputusan melalui penafsiran angka-angka lalu kemudian dilakukan evaluasi. Beberapa jenis analisis keuangan sector public antara lain Analisis Kemandirian yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai daerahnya melalui PAD, Analisis Efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan penerimaan suatu organisasi sector publik berdasarkan anggarannya, Analisis Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan dan belanja daerah, Analisis Keserasian digunakan untuk mengetahui keseimbangan antar daerahnya, Analisis Efisiensi Keuangan Daerah digunakan untuk membandingkan antara *output* dan *input* atau belanja dan pendapatan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu oleh Lestari *et al.*, (2020) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018 memperoleh hasil Efektivitas Desa Bejalen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 dilihat dari rasio rata-rata efektivitasnya diperoleh sebesar 100% yang berarti bahwa pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan anggaran pendapatan asli desa, sudah berhasil merealisasikan pendapatan asli desa. Efisiensi Desa Bejalen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang tahun anggaran 2017 sampai dengan 2018 dilihat dari rata-rata hasil rasio perhitungan yaitu 95,9% masuk dalam katagori kurang efisiensi yang berarti bahwa pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang kurang berhasil dalam merealisasikan belanja dengan anggarannya.

Penelitian terdahulu oleh S Eka P & Munandar, (2021) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016 - 2020 memperoleh hasil Rata-rata rasio deajarat desentralisasi Kota Malang pada periode ini sebesar 27,31%, yang berarti bahwa proporsi PAD masih relatif lebih kecil dari total penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Sementara itu, hubungan konsultatif, sehingga pemerintah daerah dinilai sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini juga menjelaskan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerah yang masih cukup tinggi. Rata-rata rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan nilai masih cukup baik yakni secara berturut-turut sebesar 106,22% dan 6,83% atau termasuk dalam kriteria sangat efektif dan sangat efisien. Selain itu, rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 46,6% atau lebih kecil dari rata-rata rasio belanja langsung sebesar 53,4% yang mencerminkan prioritas pendanaan Pemerintah Kota Malang mengarah pada kegiatan yang secara langsung berdampak pada kualitas keluaran (*output*).

Penelitian terdahulu oleh Anshori (2019) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018 Studi kasus pada BPKAD Kab. Lamongan. Memperoleh hasil bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018 memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, itu terbukti dalam merealisasikan PAD serta pajak daerah tergolong efisien karena dengan biaya yang relatif sedikit, Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada Pemerintah Pusat atau Provinsi.

Penelitian terdahulu oleh Mariasari & Nasehati S, (2021) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang tumbuh cukup pesat antara tahun 2018-2020. Hal ini diwakilkan dengan tercapainya rasio efisiensi rata-rata pemanfaatan belanjadaerah sejumlah 75,65 persen dan rata-rata efektivitas realisasi pendapatan asli daerah sejumlah 102,76 persen. Akan tetapi, penyaluran dana belanja daerah Pemerintah Kabupaten Magelang tetap dipusatkan pada belanja operasional atau rutin daripada belanja konstruksi.

Penelitian terdahulu oleh Dri & A Pangastuti P, (2022) Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan saat Pandemi Covid 19. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh hasil pertumbuhan pendapatan Pemkot Batu pada 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja di tahun 2020 mengalami penghematan dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kemandirian Pemkot Batu secara finansial baik di tahun 2019 dan 2020 masih di dominasi oleh peran pemerintah pusat. Tingkat efektivitas kinerja pendapatan daerah mengalami kenaikan dari yang semula cukup efektif di tahun 2019 menjadi sangat efektif di tahun 2020. Pemkot Batu juga mempertahankan predikat sangat efektif untuk kinerja PAD-nya. Sementara untuk pendapatan transfer juga mengalami kenaikan kinerja yang

sebelumnya cukup efektif menjadi sangat efektif di tahun 2020. Akan tetapi untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan kinerja yang semula sangat efektif menjadi kurang efektif. Tingkat efisiensi di tahun 2019 dan 2020 berada di kategori efisien walaupun terjadi penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Tingkat keserasian belanja baik di tahun 2019 dan 2020 masih didominasi oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal. Sementara untuk belanja tak terduga terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Tingkat ekonomis di tahun 2019 dan 2020 masih dapat dikatakan ekonomis baik untuk belanja daerah, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Penelitian terdahulu oleh Fornia *et al.*, (2021) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kinerja keuangan Pemkot Jambi jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata selama tahun 2010-2019 berada pada level rendah sekali yakni sebesar 21,69 persen dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pemkot Jambi belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kinerja keuangan Pemkot Jambi jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi rata-rata selama tahun 2010-2019 dapat dikategorikan kurang karena berada pada interval 10,01 persen - 20,00 persen yakni sebesar 17,13 persen. Rendahnya koefisien ini disebabkan rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemkot Jambi untuk menyelenggarakan desentralisasi masih kurang. Kinerja Keuangan Pemkot Jambi jika dilihat dari rasio efektivitas PAD rata-rata selama tahun 2010 - 2019 tergolong sangat efektif karena koefisiennya berada di atas angka 100 persen yakni sebesar 104,91 persen. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan PAD melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapat. Pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah penerimaan dari sektor pajak daerah yang melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.

Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Jambi positif. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja, rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82 persen. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio efisiensi belanja rata-rata selama tahun 2010 - 2019 tergolong efisien yakni sebesar 91,09 persen. Pemerintah Kota Jambi selama kurun waktutersebut dapat melakukan penghematan belanja. Realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian terdahulu oleh Y Melatunan & Pinatik, (2019) Dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong”. Dari hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Hasil dari analisis anggaran pendapatan belanja daerah dengan realisasinya pada Pemerintah Kota Sorong tahun anggaran 2014 – 2018 dengan menggunakan analisis kinerja keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pendapatan Pemerintah Kota Sorong secara umum dapat dikatakan kurang baik dan kinerja belanja pada Pemerintah Kota Sorong dilihat dari analisis kinerja keuangan secara umum juga dapat dikatakan kurang baik. Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Sorong pada tahun anggaran 2014 – 2018 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio efektivitas dan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja maka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2014 – 2018 bahwa kinerja Pemerintah Kota Sorong dinilai cukup efektif. Sedangkan hasil perhitungan efisiensi anggaran pendapatan, pada tahun 2014 – 2018 Pemerintah Kota Sorong juga dinilai kurang efisien dalam pengelolaan anggaran belanja. Hal ini berdampak

kurang baik bagi instansi karena dapat mengakibatkan pemborosan dalam menggunakan anggaran belanja.

Penelitian terdahulu oleh A Widiyaningsih & Margaretha, (2021) Dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari varians belanja daerah kota Surakarta selama tahun 2017-2019, secara umum dapat dikatakan baik. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari pertumbuhan belanja daerah selama tahun 2017-2019 secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari keserasian belanja daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk belanja modal. Kinerja keuangan belanja daerah kota Surakarta dilihat dari efisiensi belanja daerah, realisasi anggaran belanja pemerintah kota Surakarta tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja.

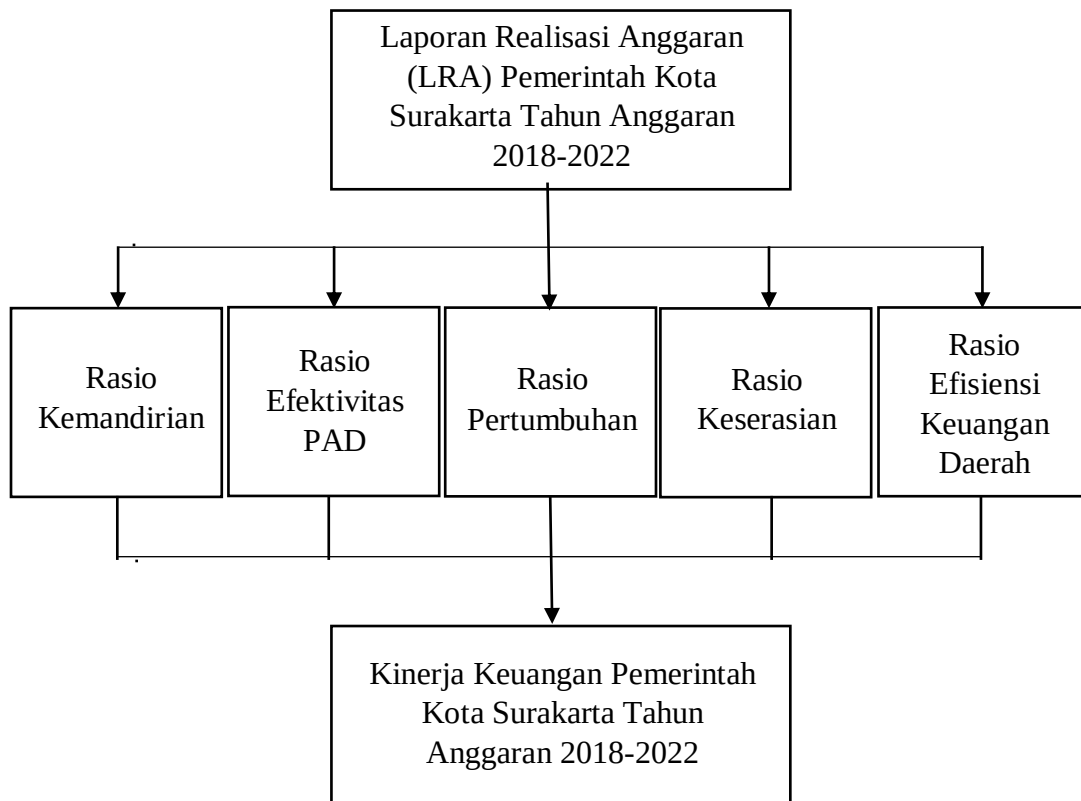
Penelitian terdahulu oleh Sari *et al.*, (2021). Dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa (1) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Selatan selama periode 2010-2013 mengalami kenaikan secara fluktuatif yaitu dengan presentase berturut-turut selama 4 tahun sebesar 17,60%, 40,39%, 53,28% dan 59,16%. Namun masih terdapat peran dominan pemerintah pusat. Pada kurun waktu 2014-2019 barulah Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki Kemandirian dalam membiayai daerahnya. (2) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi diketahui bahwa selama enam tahun periode 2010-2015 belum memiliki persentase nilai yang stabil setiap tahunnya menurut rasio derajat desentralisasi. Untuk rata-rata rasio derajat desentralisasi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun pertama sebenarnya mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selanjutnya dalam kurun waktu periode 2016-2019, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mampu

memperbaiki diri. Hal ini terlihat dengan meningkatnya rata-rata derajat desentralisasi di tahun 2017 sebesar 50,53% dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 54,05%. Kenaikan rata-rata derajat desentralisasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah siap menjalankan otonomi daerah yang memegang prinsip desentralisasi. (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah diatas Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori Tinggi sampai Sangat Tinggi. Namun di tahun 2014 terjadi penurunan rata-rata rasio ketergantungan daerah yaitu sebesar 19,49%.(4) Kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 117,31% yang mana masih berada dalam skala interval $>100\%$. Rasio Efektivitas PAD sementara itu Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja keuangan pemerintah menurut rasio efisiensi PAD Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata rasio sebesar 159,05% yang mana masih berada dalam skala interval >100 . (5) Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam satu periode ke periode berikutnya tidak memiliki kenaikan yang stabil, malah cenderung turun secara fluktuatif.

Penelitian terdahulu oleh Yulinchton *et al.*, (2022). Dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019”. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa Kemandirian Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat relatif masih rendah. Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Tegal me miliki pola instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih dominan daripada tingkat kemandirian pemerintah daerah. Efektivitas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam me ngelola PAD diindikasikan belum baik dan dikategorikan tidak efektif. Pemerintah Kabupaten Tegal memfungsikan dana secara tidak seimbang, karena mayoritas APBD digunakan dalam pembelanjaan operasional,

sedangkan rasio pembelanjaan modal masih rendah. Pertumbuhan Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang terlihat dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan PAD. Kondisi tersebut disebabkan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima oleh Kabupaten Tegal setiap tahunnya. Di sisi lain, belanja operasional daerah mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertumbuhan belanja modal. Rasio desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Tegal berfluktuasi dan berada pada kategori rendah yang diartikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan potensi PAD untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih rinci dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jangka waktu penelitian dapat lebih diperpanjang.

C. Kerangka Pikir



Gambar 1 Kerangka Pikir

Keterangan :

1. Variabel Independen

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel independen sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *prediktor*, *antecedent*, atau dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Artinya adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat), serta disebut juga sebagai variabel eksogen. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen sebagai berikut :

- a. Rasio Kemandirian
- b. Rasio Efektifitas PAD
- c. Rasio Pertumbuhan
- d. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
- e. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

2. Variabel Dependen

Menurut (Sugiyono, 2017) variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, dalam bahasa Indonesia disebut variabel terikat. Artinya adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, serta disebut dengan variabel endogen. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kinerja Keuangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2018-2022 yang diukur menggunakan beberapa rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio kemandirian memiliki rata-rata persentase yang tergolong rendah (*konsultif*), Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi sudah mulai berkurang) namun masih sangat perlu dioptimalkan lagi dalam realisasi pendapatan asli daerahnya.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah tergolong efektif. Namun masih perlu dioptimalkan kembali agar bisa menyesuaikan dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah persentase paling tinggi terjadi pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun tersebut realisasi pendapatan dapat melebihi target sebesar 122,32% dan kenaikan realisasi PAD ini terjadi pada saat pandemi *covid-19* sehingga dari realisasi PAD ini dapat dipergunakan untuk penanganan *covid-19*.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio pertumbuhan pada tahun 2020 rata-rata menunjukkan penurunan pertumbuhan dikarenakan adanya pandemi *covid-19* sehingga perlunya anggaran untuk penanganannya. Namun pada tahun 2021-2022 menunjukkan persentase kenaikan dari tahun 2020, dalam artian Pemerintah Daerah Kota Surakarta mampu untuk bangkit dari penurunan pertumbuhan menuju kenaikan pertumbuhan.

4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio keserasian dalam hal ini menunjukkan bahwa, realisasi belanja operasi lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal, sehingga dapat dapat disimpulkan bahwa realisasi belanja operasi dan realisasi belanja modal tidak serasi atau tidak seimbang dikarenakan lebih banyak pengeluaran yang digunakan untuk biaya operasi.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta jika dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah kurang efisien dikarenakan dalam merealisasikan belanja daerahnya masih perlu diminimalisir dalam pengeluaran biaya yang berlebihan atau terlalu banyak sehingga pendapatan daerah bisa di gunakan untuk keperluan yang lebih berguna bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Pemerintah Daerah Kota Surakarta harus mampu meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemanfaatan aset – aset daerah yang potensial. Pemerintah Daerah Kota Surakarta selalu melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pemerolehan pendapatan asli daerah. Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga harus berusaha untuk mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kota yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan berbagai macam rasio yang bisa menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya dan memperluas lingkup wilayah penelitian dan jangka waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Z. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016-2018*. 4(2), 1113–1132.
- Ari Widiyaningsih, V., & Margaretha, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2017-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, Desember*, 54–67.
- Darma, N. D. A. (2019). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135.
- Dri, W., & Ani Pangastuti Puspita, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1), 90–104.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Fornia, E., Mukhzarudfa, & Gowon, M. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 6(1), 34–44.
- Lestari, D., Pertiwi, I., Muchlisun, M., Khabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humanira*, 01(09), 2686–5661.
- Mariasari, V., & Nasehati Sunaningsih, S. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *Jurnal Riset ...*, 7(2),

190–198.

- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151.
- Sari Eka Putri, R., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)*, 5(3), 2296–2313.
- Sari, I., Asaari, M., & Sefty Nurul Hidayah, I. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper, Desember*, 408–425.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal Of Management And Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/Distribusi.V7i1.67>
- WANCE, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Buru Selatan. *The Indonesian Journal Of Public Administration (IJPA)*, 5(1), 1–17.
- Yosias Melatunan, M., & Pinatik, S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sorong. *Jurnal EMBA*, 7(3), 4134–4143.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303–314.